**PERAN KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 ALLA KABUPATEN ENREKANG**

**Fitri Rahmawati** 1, Sulaiman Samad 2, Jumadi Tangko 3

1SMP Negeri 1 Alla

2,3Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**ABSTRACT**:

*The type of research used in this study is descriptive qualitative. The data source was chosen purposively. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Collected data then analyzed by qualitative descriptive method that is: data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study of school committee performance in SMP Negeri 1 Alla Enrekang district can be concluded that: (i) School committee performance seen from the role and function in SMP Negeri 1 Alla Enrekang district, running in accordance with the procedure. Assuming that the advisory agency in the determination and implementation of policies in educational units involves all elements. All existing elements fully support all activities related to improving the quality of learners, the convenience of the school, the fulfillment of school facilities and infrastructure. Supervision is done by principals, teachers and school committees. While the mediator with the community and parents is the teacher's duty. The discussion that is often discussed in mediating with the government and parents is the problem of school infrastructure facilities (ii) factors supporting the great commitment of parents and students to improve the quality of education so as to support the establishment of school committees. In addition to the common vision of mission, communication and good cooperation between schools and school committee parties so that activities can run well. (Iii) Inhibiting factors are lack of human resources and lack of time intensity needed to discuss further about school activities, it is because members of the school committee are busy with their respective activities. Other than that the funds and school infrastructure facilities are also a factor inhibiting the implementation of activities*.

**Keywords**: *The role of the School Committee*

**ABSTRAK:**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ganbaran peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa: (i) Peran komite sekolah dilihat dari peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla kabupaten Enrekang, berjalan sesuai dengan baik. Dengan asumsi bahwa pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan semua unsur. Semua unsur yang ada mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas peserta didik, kenyamanan sekolah, keterpenuhan sarana dan prasarana sekolah. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru maupun komite sekolah. sementara yang menjadi mediator dengan masyarakat dan orang tua siswa adalah tugas guru. Pembahasan yang sering kali di bicarakan dalam melakukan mediasi dengan pemerintah maupun orang tua siswa adalah masalah sarana prasarana sekolah (ii) faktor pendukung adanya komitmen yang besar dari orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mendukung terbentuknya komite sekolah. Selain itu adanya kesamaan visi misi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan pihak komite sekolah sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik. (iii) Faktor penghambat yakni kurangnya SDM dan kurangnya intensitas waktu yang dibutuhkan untuk membahas lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut dikarenakan anggota komite sekolah yang sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. selain itu dana dan sarana prasarana sekolah juga menjadi faktor penghambat dalam keterlaksanaan kegiatan.

**Kata kunci**: *Peran Komite Sekolah*

**PENDAHULUAN**

Menurut Rivai & Murni (2010:615), mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata sebagai berikut : *Pertama,* Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen; *Kedua,* Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara *biroratik-sentralistik* sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai denga kondisi sekolah setempat; *Ketiga,* Peran warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Menyadari akan hal tersebut, maka baik pemerintah dan masyarakat dituntut untuk terus berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, dan tentunya hal tersebut tidak akan dapat terwujud jika tidak ditopang oleh penerapan prinsip dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang baik dan berkesinambungan dari pihak lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah.

Salah satunya strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah yakni dengan pelibatan masyarakat dalam pendidikan, apalagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan dilegitimasinya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan pada pasal 1 ayat 5 bahwa : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Secara tidak langsung juga berimbas pada pemberian otonomi pada lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah sebagai satuan pendidikan. Implementasi kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi penyelenggaraan pemerintahan telah menghasilkan pergeseran dalam mengelola permasalahan dibidang pendidikan termasuk di dalamnya manajemen pendidikan. Pergeseran yang dimaksud adalah bahwa sistem pengelolaan manajemen pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik.

Dengan memperhatikan paradigma baru tersebut, maka otonomi manajemen pendidikan secara langsung maupun tidak, telah mendorong semua pihak di daerah lebih mampu menunjukkan keterlibatannya melalui peran serta dalam membangun pendidikan di daerahnya, guna dapat mengantarkan anak bangsa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu mengangkat derajatnya sendiri, melainkan juga mampu bersaing melalui perannya sehingga dapat menghadapi tantangan global

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Adanya perubahan paradigma sistem  pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, Salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten /Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau stakeholder  pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi bebasis masyarakat (community based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan  kedua  konsep tersebut  adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-progamnya, sekolahan perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk beraptisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Paertisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan, dengan demikian pelaksanaan MBS disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

## a. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang, yang meliputi: (1) Bagaimana gambaran peran Komite Sekolah dilihat dari segi peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang ? (2) Apakah yang menjadi faktor pendukung peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang ? (3) Apakah yang menjadi faktor penghambat peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang ?

## b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang diantaranya: (1) Untuk mengetahui gambaran peran Komite Sekolah dilihat dari segi peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang; (2) Untuk mengetahui faktor pendukung peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang; (3) Untuk faktor penghambat peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang.

**METODE PENELITIAN**

Jenis dan lokasi penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni jenis penelitian yang menggambarkan tentang suatu gejala, kondisi dan situasi yang ada. Penelitian ini akan di lakukan di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada peran komite sekolah

Fokus penelitian adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang pendekatan kualitatif yang dipergunakan pada penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang menjadi penjabaran dari fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah adalah upaya komite sekolah dalam :
	1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
	2. Badan Pendukung (*supporting agency*)
	3. Badan Pengontrol (*controlling agency*)
	4. Penghubung (*mediator agency*)
2. Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang.
3. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang

Sumber dataPengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan ‘ *purposive sampling*’ yaitu pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan karena itu terus menerus sepanjang penelitian. Sampling kualitatif yang tergantung pada tujuan focus pada saat itu. Penelitian ini berprinsip bahwa penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah konteks dan bukan jumlah sumber datanya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang kepala sekolah, 1 (satu) orang dari pengurus komite sekolah, 2 (dua) orang guru dari sekolah dan 1 (satu) tokoh masyarakat dari sekitar sekolah. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada analisis kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) observasi; (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diterima. Berkaitan dengan konsistensi data, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data; (2) Mereduksi data; (3) Menyajikan data; (4) Verifikasi Data; (5) Menyimpulkan hasil penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan pengujian kredibilitas data penelitian, melalui cara sebagai berikut: (1) Trianggulasi; (2) Member *Check.*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
	1. **Gambaran Peran Komite Sekolah Di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang**
2. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan

Peran pemberi pertimbangan mempunyai tugas memberi masukan atau saran dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakulikuler.

Wawancara dengan sekretaris komite sekolah:

Penyelenggaraan komite sekolah di sekolah ini sudah berjalan akttif, beberapa guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta orang tua siswa berperan sebagai pemberi pertimbangan. Pembahasan yang biasanya dibicarakan dalam rapat komite sekolah yaitu kebijakan dalam program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria peran pendidikan, kriteria tenaga kependidikan dan kriteria fasilitas pendidikan. Dalam rapat komite sekolah semua anggota berhak memberi masukan, pembahasan utama dalam komite sekolah adalah masalah peningkatan mutu peserta didik dan pemenuhan fasilita peserta didik. (Jum, 8 Maret 2017)

Wawancara diatas menjelaskan komite sekolah di SMPN 1 Alla berjalan aktif, semua unsur yang terkait dengan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan. Masalah kebijakan dalam program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah dan semua masalah yang menyangkut peningkatan mutu peserta didik adalah menjadi pembahasan dalam rapat komite sekolah.

Wawancara dengan guru :

Dalam memberi pertimbangan semua anggota komite sekolah berhak atas itu, anggota komite sekolah adalah orangtua siswa dan pihak sekolah, pembangunan dan tingkah laku siswa adalah menjadi pembahasan dalam forum. Kepala sekolah dan ketua komite sekolah sebagai penentu kebijakan.(Mur, 14 Maret 2017)

Wawancara dengan anggota komite sekolah:

Komite sekolah di sekolah ini berjalan aktif, yang menjadi anggota komite sekolah adalah semua orang tua siswa. Yang menjadi penentu kebijakan dalam komite sekolah adalah ketua komite sekolah dan pihak sekolah. Kegiatan yang menjadi fokus komite sekolah adalah pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan kwalitas peserta didik dan guru. (Juf, 25 Maret 2017)

Pendapat senada dikemukakan oleh responden diatas bahwa yang menjadi anggota komite sekolah adalah orang tua siswa dan pihak sekolah. Pengambilan kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah.

Wawancara dengan anggota komite sekolah sebagai triangulator:

Dalam memberikan pertimbangan, kami sebagai anggota komite sekolah juga dilibatkan. Rapat pertemuan komite sekolah semua orang tua siswa juga dundang karena ini menyangkut kualitas peserta didik. Pengambilan kebijakan diambil berdasarkan suara terbanyak yang kemudian disahkan oleh ketua komite sekolah. (Jam, 1 April 2017)

Wawancara dengan triangulator diatas menjelaskan bahwa sebagai anggota komite sekolah ia juga dilibatkan sebagai pemberi pertimbangan, dalam setiap pertemuan mereka selalu diundang karena menyangkut peningkatan kualitas peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan semua unsur, baik dari unsur sekolah maupun orang tua siswa dan masyarakat. Tujuan dari terbentuknya komite sekolah adalah untuk peningkatan kualitas/mutu peserta didik.

1. Pendukung (*supporting agency*)

Tindakan nyata dari persatuan orang tua dan guru ini berupa memberikan dukungan terhadap program-program sekolah, selama program tersebut baik bagi siswa, guru maupun orang tua.

Wawancara dengan sekretaris komite sekolah:

Sebagai anggota komite sangat mendukung sepenuhnya kegiatan yang ada dalam kegiatan komite sekolah. Dukungan dalam bentuk : mendorong orang tua dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggeraaan pendidikan di satuan pendidikan. Dukungan yang dibutuhkan dari pihak pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dukungan yang berwijud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. (Jum, 8 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dipahami bahwa responden mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah. Hal ini dibuktikan dengan dukungan kepada orang tua dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, serta menggalang dana dari masyarakat. Menurut responden dukungan yang dibutuhan dari pemerintah, masyarakat dan sekolah adalah dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Wawancara dengan guru :

Sebagai guru saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan komite sekolah, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan demi tercapainya perubahan yang lebih baik. Dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, masyarakat dan sekoalah adalah dana, bangunan, tenaga pendidik dan kependidikan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. (Mur, 14 maret 2017)

Selanjutnya, wawancara dengan guru:

Dalam pelaksanaan komite sekolah kami juga turut mendukung terlaksananyaa semua kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas peserta didik. Kami membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam bentuk dana, pembangunan, kesejahteran dan keamanan sekolah. (Jurf, 25 maret 2017)

Kedua responden diatasn menjelaskan bahwa mereka juga ikut mendukung terlaksananya semua kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan kualitas peserta didik. Selain itu responden juga membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk sumbangan dana, pembangunan sekolah, kesejahteraan maupun keamanan dan kenyamanan sekolah.

1. Pengontrol (controlling agency)

Hasil wawancara dengan sekretaris komite sekolah

Sebagai sekretaris komite sekolah saya juga bertanggungjawab sebagai pengontrol dalam manajemen berbasis sekolah. Masalah yang biasa muncul dalam pelaksanaan pendidikan yang menjadi perhatian komite sekolah adalah masaalah peningkatan kwalitas pendidik dan Sarana prasarana penunjang kegiatan sekolah. Mutu lulusan cukup membanggakan di tandai dengan nilai yang diperoleh setiap Ujian nasional yang sangat memuaskan dan dibuktikan juga dengan banyaknya alumni yang memiliki peran di masyarakat. Selain itu dalam komite sekolah juga menjalin komunikasi yang lancer antara komite sekolah dan pihak sekolah sehingga setiap permasalahan yang muncul cepat di atasi. (Jum, 8 maret 2017)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian dari tugasnya, peningkatan kualitas pendidik dan sarana prasarana sekolah adalah yang sering menjadi pokok bahasan dalam komite sekolah. Pengawasan dianggap berhasil karena mutu lulusan membanggakan ditandai dengan nilai yang cukup tinggi dan dilihat dari alumni yang memiliki peran di masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam sekolah cepat teratasi karena adanya komunikasi yang lancar antara pihak sekolah dan anggota komite sekolah.

Wawancara dengan guru :

Selain dilibatkan dalam perencanaan kegiatan komite sekolah, kami juga bertindak sebagai pengontrol. Masalah yang sering muncul yang menjadi perhatian komite sekolah adalah masalah sarana dan prasarana sekolah serta perlakuan guru terhadap siswa. (Mur, 14 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, responden menjelaskan bahwa dirinya juga terlibat dalam pengawasan. Ia mengatakan bahwa masalah yang sering muncul dalam manajemen sekolah adalah masalah sarana dan prasarana sekolah, dan masalah perilaku guru terhadap siswa.

Wawancara selanjutnya mengatakan:

Masalah yang biasa muncul dalam pelaksanaan pendidikan, yang menjadi perhatian komite sekolah adalah tentang keadaan siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Jika dikaitkan dengan mutu lulusan di sekolah ini, mutu luaran di sekolah ini rata-rata memuaskan, hal ini harus dipertahankan dengan cara meningkatkan mutu luaran peserta didik, mempertahankan karakter peserta didik dan peningkatan mutu tenaga pendidik. (Juf, 25 maret 2017)

Responden menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul dalam pengawasan beliau adalah masalah tata tertib sekolah. Beliau menambahkan bahwa mutu lulusan dari sekolah ini rata-rata membanggakan jika dilihat dari nilai yang diperoleh. Menurut responden hal ini harus dipertahankan dengan cara meningkatkan mutu peserta didik, pembentukan karakter dan peningkatan mutu tenaga pendidik.

1. Mediator antar pemerintah (eksekutif ) dengan masyarakat di satuan pendidikan .

Komite sekolah berfungsi sebagai mediator bukan sebagai pengambil keputusan atau decision maker.

wawancara dengan responden utama :

Dalam penyelenggaraan pendidikan kami bekerjasama dengan pihak pemerintah, sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Jika ada hal yang ingin disampaikan ke pemerintah, biasanya itu disampaikan langsung oleh kepala sekolah sebagai mediator antara sekolah dan pemerintah. Hal yang biasa menjadi pembahasan kepada pemerintah dan masyarakat adalah kebijakan dan program pendidikan, dan rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS). (Jum, 8 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah, dilakukan kerjasama antar sekolah, masyarakat, orang tua siswa dan pemerintah. Dalam menyampaikan rencana kegiatan sekolah biasanya kepala sekolah yang menyampaikan langsung kepada pemerintah. Hal yang biasa menjadi pembahasan kepada pemerintah dan masyarakat adalah kebijakan dan program pendidikan, dan rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).

Wawancara dengan guru:

Dilakukan kerjasama antar pemerintah, sekolah maupun masyarakat, yang menyampaikan atau yang menjadi mediator adalah kepala sekolah langsung yang berhu bungan dengan pemerintah. sementara yang menjadi mediator kepada masyarakat adalah guru atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Hal yang biasa menjadi pokok bahasan kepada pemerintah dan masyarakat adalah masalah pembenahan fasilitas sekolah. (Mur, 14 maret 2017)

Wawancara dengan responden utama:

Saya sebagai anggota komite sekolah melakukan mediator kepada orang tua siswa, jika hal tersebut ingin diteruskan atau disampaikan kepada pihak pemerintah maka itu menjadi bagian kepala sekolah yang menyampaikan langsung. Contohnya menyampaikan tentang pembangunan sarana dan prasarana sekolah.. (Juf, 25 maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara ke dua responden diatas menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai mediator antara sekolah dan pemerintah. sementara guru-guru juga ditugaskan menjadi mediator kepada masyarakat maupun orang tua siswa. Masalah yang sering menjadi pokok bahasan kepada pemerintah dan masyarakat adalah pembenahan fasilitas sekolah .

**2. Pembahasan Penelitian**

Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan *(stakeholder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

1. **Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah**

Peran komite sekolah yang dalam hal ini merupakan refleksi dari pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan) trlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam pngelolaan pendidikan di sekolah. Artinya, dengan MBS tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pemangku dapat dipenuhi.

Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002, meskipun fungsinya secara spesifik lokal mungkin saja telah dijalankan jauh lebih dulu sebelumnya. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dirasa sangat diperlukan, bukan hanya pada tataran konsep ataupun wacana, tetapi lebih pada tindakan nyata di lapangan. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan secara yuridis telah dituangkan dalam keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, yang selanjutnya dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dari hasil penelitian di SMP Negeri 1 Alla kabupaten enrekang peran komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah yang terkait dengan dukungan, sejalan dengan teori diatas yang menyatakan bahwa semua unsur yang ada mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas peserta didik, kenyamanan sekolah, keterpenuhan sarana dan prasarana sekolah. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka pemenuhan semua kebutuhan sekolah agar peserta didik nayaman dan aman dalam pelaksanaan PBM.

Menurut Rivai dan Murni (2010:137), komite sekolah memiliki peran untuk mengawasi, akan sangat penting program pendidikan diinformasikan sesering mungkin apakah lewat media sekolah seperti bulletin sekolah, website atau pun media komunikasi yang komite sekolah buat. Karena ini akan mempermudah dalam pengawasan terutama bagi orang tua yang tidak sempat atau sibuk sehingga tidak bisa ke sekolah langsung.

Peran komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah berkenaan dengan pengawasan, semua *stakeholder* dalam komite sekolah dilibatkan dalam pengawasan kegiatan sekolah. Masalah yang sering muncul dalam sekolah terkait sarana prasarana dan kualitas peserta didik. Tetapi hasil penelitian juga mengungkap bahwa lulusan SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang rata-rata memuaskan hal ini dilihat dari nilai ujian yang tinggi dan banyaknya alumni yang berperan di masyarakat. Berarti masalah yang terjadi dalam pengawasan dan pengamatan komite sekolah kurang relevan dengan kenyataan di lapangan, karena masalah yang sering terjadi berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, jika merujuk pada teori yang relevan maka pengawasan dalam bentuk penyampaian informasi melalui media belum terlaksana. Informasi yang diperoleh oleh orang tua siswa hanya melalui anaknya dan informasi yang langsung ditemukan ketika orang tua langsung berkunjung ke sekolah.

Komite sekolah berfungsi sebagai mediator bukan sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Menurut Rivai dan Murni (2010:137) untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: Kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS), rriteria peran satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Hasil penelitian yang sejalan dengan teori diatas bahwa komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang menjadi mediator adalah kepala sekolah dan guru-guru. Dalam penyampaian rencana kegiatan kepada pemerintah maka itu menjadi tugas kepala sekolah, sementara yang menjadi mediator dengan masyarakat dan orang tua siswa adalah tugas guru. Pembahasan yang sering kali di bicarakan dalam melakukan mediasi dengan pemerintah maupun orang tua siswa adalah masalah sarana prasarana sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaitkan dengan kajian teori yang relefan dengan peran komite sekolah dilihat dari peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan semua unsur, baik dari unsur sekolah maupun orang tua siswa dan masyarakat. Tujuan dari terbentuknya komite sekolah adalah untuk peningkatan kualitas/mutu peserta didik. semua unsur yang ada mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas peserta didik, kenyamanan sekolah, keterpenuhan sarana dan prasarana sekolah. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka pemenuhan semua kebutuhan sekolah agar peserta didik nayaman dan aman dalam pelaksanaan PBM. Pengawasan dalam bentuk penyampaian informasi melalui media belum terlaksana. Informasi yang diperoleh oleh orang tua siswa hanya melalui anaknya dan informasi yang langsung ditemukan ketika orang tua langsung berkunjung ke sekolah. Yang menjadi mediator adalah kepala sekolah dan guru-guru. Dalam penyampaian rencana kegiatan kepada pemerintah maka itu menjadi tugas kepala sekolah, sementara yang menjadi mediator dengan masyarakat dan orang tua siswa adalah tugas guru. Pembahasan yang sering kali di bicarakan dalam melakukan mediasi dengan pemerintah maupun orang tua siswa adalah masalah sarana prasarana sekolah.

1. **Faktor pendorong Peran Komite Sekolah**

Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi adalah tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. penampilan peran sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Hasil penelitian mengungkap bahwa peran komite sekolah tentang faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang besar dari orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mendukung terbentuknya komite sekolah. Selain itu adanya kesamaan visi misi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan pihak komite sekolah sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu sarana prasarana dan dana juga menjadi pendukung terselenggaranya peran komite sekolah.

1. **Faktor Penghambat Peran Komite Sekolah**

Faktor penghambat dalam peran komite sekolah adalah kurangnya SDM dan kurangnya intensitas waktu yang dibutuhkan untuk membahas lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut dikarenakan anggota komite sekolah yang sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. selain itu dana dan sarana prasarana sekolah juga menjadi faktor penghambat dalam keterlaksanaan kegiatan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang mengenai kinerja komite sekolah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

* 1. **Kinerja Komite Sekolah dilihat dari segi peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang**

Kinerja komite sekolah dilihat dari peran dan fungsi di SMP Negeri 1 Alla kabupaten Enrekang, berjalan sesuai dengan prosedur. Dengan asumsi bahwa pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan semua unsur, baik dari unsur sekolah maupun orang tua siswa dan masyarakat. Tujuan dari terbentuknya komite sekolah adalah untuk peningkatan kualitas/mutu peserta didik. Semua unsur yang ada mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas peserta didik, kenyamanan sekolah, keterpenuhan sarana dan prasarana sekolah. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka pemenuhan semua kebutuhan sekolah agar peserta didik nayaman dan aman dalam pelaksanaan PBM. Pengawasan dalam bentuk penyampaian informasi melalui media belum terlaksana. Informasi yang diperoleh oleh orang tua siswa hanya melalui anaknya dan informasi yang langsung ditemukan ketika orang tua langsung berkunjung ke sekolah. Yang menjadi mediator adalah kepala sekolah dan guru-guru. Dalam penyampaian rencana kegiatan kepada pemerintah maka itu menjadi tugas kepala sekolah, sementara yang menjadi mediator dengan masyarakat dan orang tua siswa adalah tugas guru. Pembahasan yang sering kali di bicarakan dalam melakukan mediasi dengan pemerintah maupun orang tua siswa adalah masalah sarana prasarana sekolah.

* 1. **Faktor pendorong kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang**

Faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang besar dari orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mendukung terbentuknya komite sekolah. Selain itu adanya kesamaan visi misi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan pihak komite sekolah sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu sarana prasarana dan dana juga menjadi pendukung terselenggaranya kinerja komite sekolah.

* 1. **Faktor penghambat kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang**

Faktor penghambat dalam kinerja komite sekolah adalah kurangnya SDM dan kurangnya intensitas waktu yang dibutuhkan untuk membahas lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut dikarenakan anggota komite sekolah yang sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. selain itu dana dan sarana prasarana sekolah juga menjadi faktor penghambat dalam keterlaksanaan kegiatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arismunandar, 2008. *Perilaku Organisasi dalam Pendidikan*, Makassar: Badan Penerbit UNM

Danim, Sudarwan. 2010, *Otonomi Manajemen Sekolah* ; Bandung, Penerbit CV. Alfabeta

Daryanto. 2013. *Administrasi dan Manajemen Sekolah* : Jakarta: PT.Rineka Cipta

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003: *Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta: Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007-2009.* Jakarta: Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Fattah, Nanang, H. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: C.V.Pustaka Bani Quraisy.

Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers. Jakarta.

*Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002* *tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.* Jakarta; Sinar Grafika.

Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

*Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi (edisi ketiga),* 2010. Makassar; Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar : Penerbit Badan Penerbit UNM

Riduwan, 2009, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta

Rivai & Murni, 2010. *Education Manajemen (Analisis Teori dan Praktik),*Jakarta, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada

Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan* *Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat : Strategi Memenangkan Persaingan Mutu,* Jakarta: PT. Nimas Multima.

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: CV. Alfabeta.

Syaifuddin, M, Wuriyanto A.B, Fatimah, S.S, Efendy, M.M., & Anshory, I.AM, 2008 : *Manajemen Berbasis Sekolah* (*Bahan Ajar Cetak*). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional.* Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011. *Manajemen Pendidikan* Bandung: Alfabeta.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta; Sinar Grafika.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.* Jakarta; Sinar Grafika.

Usman, Husaini 2010, *Manajemen,* Teori, Praktek dan Riset Pendidikan Edisi 3 Jakarta Timur, Bumi Aksara.